

PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA
TENTANG
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN
DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

Pemerintah Republik Indonesia
dan
Pemerintah Republik Kroasia

Berhasrat mengadakan suatu Persetujuan mengenai penghindaran pajak berganda yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan.

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

ORANG DAN BADAN YANG TERLOPOK DALAM PERSETUJUAN

Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan.

Pasal 2

PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN

- (1) Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan atau pemerintah daerahnya yang membebankan atau pemungutan pajak-pajak tersebut.
- (2) Denda, penalti, sanksi-pajak, atau biaya denda, penalti, sanksi-pajak yang dikenakan atas sebuah penghasilan atau sebagian penghasilan yang telah dikenakan pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh pemerintah daerahnya.
- (3) Persetujuan ini diterapkan terhadap pajak-pajak yang dikenakan oleh pemerintah.

a) di Republik Indonesia:

ajak penghasilan yang dipungut berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah);

(selanjutnya disebut sebagai "pajak Indonesia");

b) di Republik Kroasia:

(i) pajak atas keuntungan;

(ii) pajak atas penghasilan;

(selanjutnya disebut sebagai "pajak Kroasia").

- (4) Persetujuan ini berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau pada hakikatnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang sekarang berlaku. Pada akhir setiap tahun, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan harus saling memberitahukan satu sama lain mengenai setiap perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan perpajakan mereka.

Pasal 3

PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM

- (1) Kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan:

a) Istilah "Indonesia", berarti wilayah Republik Indonesia sebagai mana ditentukan dalam perundang-undangannya;

bi Istilah "Kroasia" berarti wilayah Republik Kroasia, dan akan pula meliputi lain yang berbatasan dengan batas lain dari teritorial Republik Kroasia, dan akan termasuk dalam wilayahnya, yang menurut Republik Kroasia sesuai dengan hukum internasional, serta Undang-undang Republik Kroasia mengenai wilayah laut-laut kedaulatan dan perikanan.

Istilah "Negara-negara pada Persetujuan dan Negara-negara ketiga pada Persetujuan" berarti Indonesia, Kroasia, Yugoslavia, dan lain-lain yang kalimatnya.

- d) istilah "badan/badan" meliputi orang pribadi, persemaan dan setiap kumpulan dari orang-orang dan/atau badan-badan;
- e) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum;
- f) istilah "perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan" masing-masing berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan;
- g) istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali jika kapal atau pesawat udara itu semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat di Negara pihak lainnya pada Persetujuan;
- h) istilah "warganegara" berarti setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan setiap badan hukum, usaha bersama dan persekutuan yang statusnya mereka peroleh berdasarkan hukum yang berlaku pada salah satu Negara pihak pada Persetujuan;
- i) istilah "pelatib yang berwenang" berarti :
 - (i) dalam hal Indonesia, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;
 - (ii) dalam hal Kroasia, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;

- (2) Selubungas dengan penempatan Persetujuan pada setiap waktu oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan, setiap hal lain yang tidak direvisi dalam Persetujuan ini, termasuk anti-tariff, perdagangan internasional, tingkat tarif, kebijakan mengenai pajak-pajak yang dibuat dalam Persetujuan ini, untuk jasa dari perusahaan yang bergerak hanya di antara dua entitas yang berwenang untuk perdagangan internasional yang didirikan di Negara tersebut, tidak akan dapat menimbulkan yang merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.

Pasal 4
PENDUDUK

- (1) Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang dan badan, yang menurut perundang-undangan Negara tersebut dapat dikenakan pajak di Negara itu berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan mangementnya, ataupun atas dasar lainnya yang sifatnya serupa. Tetapi istilah ini tidak mencakup orang atau badan yang dapat dikenakan pajak di Negara itu hanya berdasarkan alasan bahwa penghasilan berasal dari Negara tersebut.
- (2) Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut:
 - a) Ia hanya akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok).
 - b) Jika Negara di mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, maka ia hanya akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia biasanya berdiam.
 - c) Jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, maka ia hanya akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana ia menjadi warga negara.
 - d) Jika ia menjadi warga negara dari kedua Negara atau sama sekali tidak menjadi warga negara dari salah satu Negara tersebut, maka sebagai orang yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana tempat tinggal tetap yang efektif berada.
- (3) Apabila karena ketentuan-ketentuan pada ayat 2, a dan b, seseorang menjadi penduduk dari kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana tempat tinggal tetap yang efektif berada.

Pasal 5

BENTUK USAHA TETAP

- (1) Untuk kepentingan Persetujuan ini istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan.
- (2) Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi :
 - a) suatu tempat kedudukan manajemen;
 - b) suatu cabang;
 - c) suatu kantor;
 - d) suatu pabrik;
 - e) suatu bengkel; dan
 - f) suatu pertanian atau perkebunan;
 - g) suatu tambang, sumur minyak atau gas, suatu penggalian atau suatu tempat penggalian atau eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam.
- (3) Istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi :
 - a) suatu bangunan atau proyek konstruksi, perakitan atau instalasi atau kegiatan pengawasan yang ada hubungan dengan proyek tersebut, asalkan kegiatan tersebut berlangsung lebih dari 6 bulan;
 - b) pemberian jasa, termasuk jasa konsultan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan melalui karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung untuk proyek yang sama atau proyek yang ada kaitannya untuk suatu masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari 3 bulan dalam periode 12 bulan;
 - c) penggunaan suatu instalasi atau tempat pengolahan atau pabrik di suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam merupakan bentuk usaha tetap hanya apabila kegiatan tersebut berlangsung lebih dari 6 bulan;
 - d) penggunaan fasilitas-fasilitas sarana-sarana dengan maksud untuk menyimpan, memisahkan, berantre-berantre atau barang cadangan milik perusahaan;

- f) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan, dipasarkan;
 - g) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk dijual oleh perusahaan lain;
 - h) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan informasi bagi keperluan perusahaan;
 - i) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud menjalankan setiap kegiatan lainnya yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan;
 - j) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata ditujukan untuk melakukan gabungan kegiatan - kegiatan seperti disebutkan pada sub ayat d) sampai dengan sub ayat e), asalkan hasil penggabungan seluruh kegiatan - kegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang.
- (3) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, apabila orang atau badan kecuali agen yang bertindak bebas sebagaimana beraku ayat 1, bertindak atas nama perusahaan dan mempunyai dan hingga melakukan wewenang untuk membuat kontrak atas nama perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut dianggap menjadi bentuk usaha tetap di Negara tersebut atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut, kecuali untuk kepentingan perusahaan tersebut, apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang atau badan tersebut termasuk pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang apabila dilakukan melalui tempat usaha tetap tidak akan membuat tempat usaha tetap ini menjadi bentuk usaha tetap atas ran hukum-ketentuan ayat tersebut.
- (4) Suatu perusahaan tidak akan dianggap menyimpang suatu bentuk perusahaan di suatu Negara apabila secara keseluruhan hanya semata-mata dengan pelaksanaan dan menjalankan usaha di Negara lain melalui melalui karyawan, pegawai, atau orang lainnya yang semata-mata hanya penunjang orang atau badan tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang.

(5) Suatu perusahaan yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 yang dimaksudkan dalam ayat 4 dan lainnya pada Paragraf ini akan menjalankan usaha di Negara lain hanya melalui melalui suatu bentuk usaha tetap maupun dengan cara-cara lain, maka hal

itu tidak dengan sendirinya akan berkurang, bahwa salah satu dari kemungkinan itu merupakan bentuk usaha tetap dari yang lainnya.

Pasal 6

PENGHASILAN DARI HARTA TAK GERAK

- (1) Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari harta tak gerak dan hasil penghasilan yang diperoleh dari pertanian atau kehutanan yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.
- (2) Istilah "harta tak gerak" akan meliputi di sini semua dengan berlandaskan dengan Negara pihak pada Persetujuan dimana harta yang bersangkutan berada. Istilah tersebut meliputi juga benda-benda yang menyertai harta tak gerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam usaha pertanian dan kehutanan, hak-hak terhadap suatu berlaku, ketentuan-ketentuan dalam hukum umum mengenai pemilikan atas lahan, hak menungut hasil atas harta tak gerak, serta hak atas pembayaran-pembayaran tetap atau tak tetap sebagai balas jasa untuk pengerjaan, atau hak untuk mengerjakan kandungan mineral, sumber-sumber dan sumber-sumber kekayaan alam lainnya. Kapal laut, pesawat dan pesawat lainnya tidak dianggap sebagai harta tak gerak.
- (3) Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 berlaku juga terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung dari perusahaan, dari dan penggunaan harta tak gerak dalam bentuk apapun.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 1 dan 3 berlaku juga terhadap penghasilan yang diperoleh dari harta tak gerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tak gerak yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan usaha.

Pasal 7

LABA PERUSAHAAN

- (1) Laba perusahaan yang berada di Negara pihak pada Persetujuan dan yang tidak dapat pajak di Negara lain karena perusahaan tidak ada atau karena perusahaan tidak ada di Negara lain pada Persetujuan dan karena perusahaan tidak ada di Negara lain pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak di Negara lain tersebut.

- 2) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 1, jika suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di suatu negara yang akan diperhitungkan sebagai laba bersih usaha tetap itu oleh masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, ialah laba yang diperolehnya sendainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan yang terpisah dan bertindak bebas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa, dalam kegiatan yang sama atau serupa, dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap itu.
- 3) Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, untuk dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan dari bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pemperatan dan biaya-biaya administrasi umum baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain. Ketentuan ini akan berlaku terhadap pembatasan-pembatasan menurut Undang-undang tersebut.
- 4) Sepanjang merupakan kewajiban di salah satu Negara pihak pada Persetujuan, menurut perundang-undangannya, untuk menetapkan besarnya laba yang dapat dianggap berasal dari suatu bentuk usaha tetap dengan cara menentukan bagian laba berbagai bagian perusahaan tersebut atas keseluruhan laba perusahaan itu dan bagiannya, maka ketentuan-ketentuan pada ayat 2 dari Pasal ini tidak akan menutup kemungkinan bagi Negara pihak pada Persetujuan dimaksud untuk menentukan besarnya laba yang dikenakan pajak berdasarkan pembagian itu yang lazim dipakai, namun cara pembagiannya harus selanjutnya cukup sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pasal ini.
- 5) Laba yang semata-mata berasal dari pembelian barang-barang atau barang angkut yang dilakukan oleh suatu bentuk usaha tetap untuk memperbarui tidak dianggap sebagai laba dari bentuk usaha tetap.
- 6) Dalam perjanjian yang ditandatangani, besarnya laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari cara yang telah dipakai oleh Negara pihak yang lain dan cara yang sama dilakukan pada perjanjian.
- 7) Jika dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan bahwa bagian-bagian dari laba yang akan dikurangkan dari penghasilan sebelum pajak dari suatu bentuk usaha tetap akan dikurangkan dari penghasilan sebelum pajak terapan, maka ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku.

Pasal 8
PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA

- (1) Laba yang berasal dari pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat udara di jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana Perusahaan yang mengoperasikan kapal-kapal laut atau pesawat udara berkedudukan.
- (2) Untuk kepentingan Persetujuan ini, keuntungan dari pengoperasian kapal-kapal laut dan pesawat udara di jalur lalu lintas internasional termasuk:
 - a) keuntungan yang diperoleh dari charter atau penyewaan kapal-kapal dan pesawat udara sekali-kali atas dasar "bareboat" di jalur lalu lintas internasional;
 - b) keuntungan yang diperoleh dari penggunaan, penggunaan, penyewaan container-container (termasuk trailer dan perlengkapan yang berhubungan dari pengangkutan container), yang digunakan untuk pengangkutan barang-barang atau barang dagangan sepanjang penyewaan tersebut digunakan atau diurus oleh atau sekali-kali oleh pelengkap dari pengoperasian kapal-kapal laut dan pesawat udara di jalur internasional;
- (3) Ketentuan-ketentuan ayat (1) berlaku pula terhadap laba dari perusahaan dalam suatu gabungan perusahaan, suatu usaha bersama atau dari suatu persekutuan untuk operasi internasional.

Pasal 9
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMILIKI
KEBUTUHAN ISTIMEWIA

- (1) Apabila

(1) Apabila suatu perusahaan yang berkedudukan di Negara pihak lain pada Persetujuan ini, yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan yang berkedudukan di Negara pihak lain pada Persetujuan ini, atau

- b) orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan,

dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksudkan dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diartikan atau ditrapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterimanya karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak.

- (2) Apabila suatu Negara pihak pada Persetujuan melakukan pembetulan atas laba suatu perusahaan di Negara itu dan dikenakan pajak, sedang bagian laba yang dibetulkan itu adalah juga merupakan laba perusahaan yang telah dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan di Negara yang disebut pertama tadi, maka berdasarkan syarat-syarat yang dibuat antara kedua pemerintah yang sepenuhnya bebas, Negara pihak lainnya pada Persetujuan akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah laba yang dikenakan pajak dari perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tersebut. Dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian ini, diharuskan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini dan apabila dianggap perlu, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara saling berkoordinasi.
- (3) Negara pihak pada Persetujuan tidak akan melakukan pembetulan laba perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, apabila batas waktu yang diberikan oleh masing-masing undang-undang pajaknya telah berlalu.

Pasal 10 DIVIDEN

- (1) Dividen yang dibagikan oleh suatu perusahaan yang sama, menurut ketentuan Negara pihak mana hukumnya berlaku kepada pemegang saham pihak lain pada Persetujuan dan perusahaan lokal Negara pihak lainnya tersebut.
- (2) Laba dan keuntungan dari suatu modal juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perusahaan yang membagikan dividen tersebut berkedudukan sesuai dengan peraturan-peraturan Negara tersebut, akan tetapi apabila pemilik saham yang menerima dividen itu adalah penduduk Negara pihak lainnya

pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% dari jumlah netto dividen.

Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menetapkan cara penarikan dari pembatasan ini dengan persetujuan bersama. Ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak atas laba perseroan dimana pembayaran dividen dibayarkan.

- (3) Istilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat pinzang yang berhak atas pembagian laba, maupun penghasilan lainnya dari hasil-hasil perseroan yang oleh undang-undang perpajakan Negara dimana perseroan yang membagikan dividen itu berkedudukan, dalam pengenaan pajaknya, diperlakukan sama dengan penghasilan dari saham-saham.
- (4) Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen, yang merupakan penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, di mana perseroan yang membagikan dividen itu berkedudukan, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bisnis dengan suatu tempat usaha tetap yang berada di sana dan memiliki saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.
- (5) Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan memperoleh laba atau penghasilan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, Negara pihak lainnya tersebut tidak boleh mengenakan pajak apapun juga atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan itu, kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau apabila penguasaan saham-saham yang menghasilkan dividen itu merupakan hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang berada di Negara pihak lainnya tersebut, juga tidak boleh mengenakan pajak atas laba yang dihasilkan oleh saham-saham dividenan tadi yang dibayarkan atau diterima, atau dianggap diterima oleh salah satu dari anggota atau direksi atau pejabat yang setara dari Negara pihak lainnya tersebut.
- (6) Laba yang oleh ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini berlaku untuk suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka keuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tersendiri di

Negara pihak lainnya itu termasuk undang-undangnya, namun pajak tambahan tersebut tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah keuntungan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya atas penghasilan yang dikenakan di Negara pihak lainnya tersebut.

- (17) Ketentuan-ketentuan dari ayat 5 Pasal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terdapat dalam setiap kontrak bagi hasil dan kontrak-kontrak karya atau kontrak lainnya yang serupa di sektor minyak dan gas bumi atau sektor pertambangan lainnya yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia, badan-badan pemerintahannya, perusahaan minyak dan gas milik negara, atau badan-badan lainnya yang merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan.

Pasal 11 B U N G A

- (1) Bunga yang berasal dari sumber Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.
- (2) Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tempat bunga itu berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila pemberian pinjaman yang menikmati bunga itu adalah penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah bruto bunga. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan menetapkan cara penempatan dan pembatasan ini, dengan persetujuan bersama.
- (3) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 2, bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan diterima oleh Pemerintah Negara pihak lainnya pada Persetujuan termasuk Pemerintah daerahnya, Bank Sentral atau badan lembaga keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah, yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, yang menerima pinjaman, disetujui olehnya pejabat-pejabat berwenang dari Negara-negara pihak pada Persetujuan, akan dikenakan pajak di Negara yang menerima pinjaman.
- (4) Bunga yang berasal dari suatu bank internasional, program atau dana, lembaga keuangan umum, bank yang dimiliki dengan modal maupun yang tidak dimiliki oleh bank yang mempunyai aset atau modal lain maupun yang tidak dan sumbernya penghasilan dari semua-sifat perbendaharaan Negara dan surat-surat obligasi atau

surat-surat hutang, termasuk premi dan hadiah yang terdapat pada surat-surat berharga, obligasi atau surat-surat hutang tersebut. Pengenaan denda untuk keterlambatan pembayaran tidak dianggap sebagai bunga dalam pengertian Pasal ini.

- (5) Sete-tuan-ketentuan ayat 1 sampai ayat 3 tidak akan berlaku apabila pember pinjaman yang menikmati bunga tadi berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana tempat bunga itu berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berada di sana, dan tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.
- (6) Bunga dianggap berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan bunga adalah Negara itu sendiri, pemerintah daerahnya atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayar bunga itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana bunga yang dibayarkan menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut, maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan di mana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada.
- (7) Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan pemilik yang menikmati bunga atau antara keduanya dengan orang atau badan lain dengan memperhatikan besarnya tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan antara pembayar dan pemilik yang menikmati bunga seandainya hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang telah dibayarkan tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran bunga tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pajak penghasilan pada Persetujuan dengan ketentuan-ketentuan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan hukum masing-masing.

gerak yang terletak di suatu Negara pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara tersebut.

- (5) Keuntungan dari pemindahalangan harta lainnya kecuali yang disebut pada ayat-ayat 1 sampai dengan 4, hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana orang atau badan yang memindahkan harta itu berkedudukan.

Pasal 14

PEKERJAAN BEBAS

- (1) Penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali dalam satu keadaan di bawah ini, bila mana penghasilan semacam itu dapat akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan :
- a) apabila ia mempunyai tempat usaha tetap yang tersedia secara teratur baginya di Negara pihak lainnya pada Persetujuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya. Dalam hal demikian dapat dikenakan pajak di Negara lain itu hanya sepanjang penghasilan tersebut berasal dari tempat usaha tetap itu atau
 - b) apabila ia tinggal di Negara pihak lainnya pada Persetujuan untuk suatu masa atau masa-masa yang melebihi 90 hari dalam masa 12 bulan. Dalam hal demikian, dapat dikenakan pajak di Negara lain itu hanya sepanjang penghasilan tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya di Negara tersebut.
- (2) Istilah "jasa-jasa profesional" terutama meliputi kegiatan-kegiatan di bidang seni, pertunjukan, kesisasteraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran, olahraga, kesenian, atau sejenisnya, demikian juga pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh para dokter, ahli hukum, akuntan, konsultan, dan orang-orang lain yang serupa.

Pasal 15

KEPENDIDIKAN DAN PENELITIAN

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 16, 18 dan 19 gilirannya dan ketentuan lainnya yang serupa yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dalam pekerjaan ilmiah atau hubungan kerja, hanya akan dikenakan

pajak di Negara itu, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Dalam hal demikian, maka imbalan yang diterima dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya itu.

- (2) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat (1), imbalan yang diterima atau diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pekerjaan yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama apabila:
 - a) penerima imbalan berada di Negara pihak lainnya itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan; dan
 - b) imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk Negara pihak lainnya tersebut; dan
 - c) imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara pihak lainnya tersebut.
- (3) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal 14, imbalan yang diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional oleh suatu perusahaan dari satu Negara pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara tersebut.

Pasal 16

IMBALAN PARA DIREKTUR

Imbalan para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa lainnya yang diperoleh penduduk Negara pihak pada Persetujuan dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan direktur suatu perusahaan atau sebagai orang lain yang serupa dari perusahaan yang berkedudukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.

Pasal 17

PAJAK TERKAIT DENGAN SENI

- (1) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 4 dan 15, penghasilan yang diperoleh penduduk dari Negara pihak pada Persetujuan sebagai penghibur, seperti artis teater, film, radio atau televisi atau pemain musik atau sebagai olahragawan,

dari kegiatan-kegiatan pribadinya yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.

- (2) Apabila penghasilan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang dilakukan oleh pengalir atau ahli waris tersebut diterima, bukan oleh pengalir atau ahli waris itu sendiri tetapi oleh orang atau badan lain, menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 7, 14 dan 15, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana kegiatan-kegiatan pengalir atau ahli waris itu dilakukan.

Pasal 18

PENSIUN

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 2 Pasal 19, pensiun dan imbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan hubungan dengan pekerjaan di masa lampau hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.

Pasal 19

PEJABAT PEMERINTAH

- (1) a) Imbalan, selain dari pensiun, yang dibayarkan oleh Negara pihak pada Persetujuan atau pemerintah daerahnya kepada seseorang hubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau pemerintah daerahnya hanya dikenakan pajak di Negara itu.
- b) Namun demikian, imbalan tersebut hanya dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan apabila jasa-jasa tersebut diberikan di Negara pihak lainnya itu dan orang tersebut adalah penduduk Negara itu juga.
- (2) a) Imbalan pekerjaan dan negara lainnya
b) Imbalan pekerjaan penduduk Negara itu, pemerintah daerahnya atau swasta membayar jasa-jasa tersebut
- (3) a) Imbalan yang dibayarkan kepada orang yang tidak bertempat tinggal di Negara pihak pada Persetujuan atau pemerintah daerahnya kepada seseorang hubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara itu atau pemerintah daerahnya hanya dikenakan pajak di Negara itu.

b) Namun demikian, persian tersebut hanya dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan bilamana orang tersebut adalah penduduk dan warga negara dari Negara pihak lainnya itu.

- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 15, 16 dan 18 akan berlaku terhadap imbalan dan persian dari jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha yang dijalankan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan atau pemerintah daerahnya.

Pasal 20

PROFESOR, GURU, SISWA DAN PEMAGANG

- (1) Imbalan yang diterima oleh seorang profesor atau guru yang merupakan penduduk atau segera sebelum mengunjungi suatu Negara pihak pada Persetujuan merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan berada di Negara yang disebutkan pertama untuk suatu masa tidak lebih dari dua tahun untuk melakukan penyelidikan atau penelitian lanjutan atau untuk mengajar pada universitas, akademi, sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang sejenis tidak akan dikenakan pajak di Negara yang disebutkan pertama, sepanjang imbalan tersebut berasal dari sumber di luar Negara tersebut.
- (2) Seseorang yang merupakan penduduk atau segera sebelum mengunjungi suatu Negara pihak pada Persetujuan merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan berada di Negara yang disebut pertama semata-mata sebagai pelajar di universitas, akademi, sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang sejenis atau sebagai pemanggang akan diachaskan dari pengenaan pajak di Negara itu sejak tanggal kedatangan pertama di Negara itu sehubungan dengan kunjungan tersebut.
- a) atas semua pembayaran-pembayaran yang diterima untuk mendanai kehidupan hidupnya, pendidikan atau magang, sepanjang kunjungan tersebut berasal dari sumber diluar Negara tersebut.
- b) untuk masa tidak lebih dari dua tahun, atas semua imbalan yang diterima dalam pasal 17 dan 18 yang tidak termasuk pembayaran untuk magang dan di atas pembagian laba yang diterima di Negara itu sebagai pemanggang, dan di Negara itu tidak dikenakan pajak.
- (3) Seseorang yang merupakan penduduk atau segera sebelum mengunjungi suatu Negara pihak pada Persetujuan merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan berada di Negara yang disebut pertama semata-mata untuk

belanja, pembelian atau utang sebagai penerima hibah, pemberian atau penghargaan atau penggantian pendidikan, kesehatan atau organisasi amal atau di bawah program bantuan teknik yang diberikan oleh Pemerintah suatu Negara pihak pada Persetujuan akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara lain untuk suatu masa tidak lebih dari dan tahun sejak tanggal kedatangannya pertama di Negara yang dikehendaki pertama sebagaimana dengan ketentuan tersebut atas:

- (a) jumlah dari hibah, pemberian atau penghargaan tersebut dan
- (b) semua pembayaran-peribayaran yang diterima untuk keperluan hidupnya pendidikan atau utang, sepanjang pembayaran-pembayaran tersebut berasal dari sumber di luar Negara tersebut; dan

Pasal 21

PENGHASILAN LAINNYA

- (1) Jenis-jenis penghasilan yang tidak disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu dalam Persetujuan ini yang diterima atau diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan, selama penghasilan dalam bentuk modal, hadiah hanya dikenakan pajak di Negara tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang tidak berlaku terhadap penghasilan, selain penghasilan dari pemindahtanganan barang bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2, jika penerima penghasilan tersebut yang merupakan penduduk Negara pihak pada Persetujuan, yang menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan pekerjaan bebas di Negara pihak lainnya melalui tempat kerja yang berada di sana, dan bahwa kata yang memberikan penghasilan itu mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, maka ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.

Pasal 22

PENGHINDAKAN PAJAK BERGANDA

- (1) Pihak yang penduduk Indonesia mempunyai penghasilan atau modal yang diterima atau diperoleh di Negara lain, yang penghasilan atau modal tersebut yang dikenakan pajak di Negara lain, yang penghasilan atau modal tersebut yang dikenakan pajak di Indonesia atau penghasilan tersebut yang dibayar sesuai dengan Undang-undang dan peraturan perpajakan.

- (2) Bila seorang penduduk Kroasia memperoleh penghasilan yang menurut ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dapat dikenakan pajak di Indonesia, maka Kroasia akan memberikan pengurangan terhadap pajak atas penghasilan penduduk tersebut sebesar pajak penghasilan yang dibayar di Indonesia. Namun, pengurangan tersebut tidak akan melebihi bagian yang sebanding dengan bagian penghasilan yang dikenakan di Indonesia dari pajak yang dihitung sebelum pengurangan diberikan.
- (3) Menyimpang dari ketentuan perundang-undangannya, Indonesia akan memberikan kredit sebagaimana disebutkan dalam ayat 2, sehubungan dengan pajak yang dikenakan di Kroasia atas dividen, sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan bunga, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 11 ayat 2, berdasarkan Persetujuan ini, tetapi yang untuk sementara diabaikan atau dikurangkan menurut undang-undang perpajakan Kroasia.

Pasal 23

NON DISKRIMINASI

- (1) Warga negara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan pengenaan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban pihak yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap warganegara dari Negara pihak lainnya dalam keadaan yang sama.
- (2) Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tidak akan dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pengenaan pajak atas perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sama di Negara pihak lainnya itu. Ketentuan ini tidak dapat diterapkan sebagai kewajiban suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan suatu potongan ordo-beli, kebagian-redistribusi dan subsidi-pengurangan untuk kepentingan perusahaan pihak lain dalam negeri atau untuk tujuan apapun lainnya, kecuali yang diberikan kepada penduduknya sendiri.
- (3) Ketentuan ini akan berlaku untuk semua bentuk kegiatan yang dijalankan, baik seluruhnya dimiliki atau dimiliki baik langsung atau tidak langsung oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berlainan dengan pengenaan pajak di Negara yang

disebut pertama yang berlapang atau lebih memberatkan cara dan pengenaan pajak dan sewajarnya-sewajarnya dimaksud yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa di Negara yang disebut pertama.

- (4) Kecuali dalam hal ketentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 7 atau Pasal 12 ayat 6 berlaku, undang-undang dan pembayaran-pembayaran lain yang dikenakan oleh perusahaan dan Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dalam menentukan laba yang dapat dikenakan pajak atas perusahaan semacam itu akan dapat diurungkan di bawah kondisi yang sama apabila hal itu dibayarkan kepada penduduk dari Negara yang disebut pertama.
- (5) Menyimpang dari ketentuan ketentuan ayat 2, ketentuan-ketentuan dari Pesa ini berlaku terhadap jenis pajak-pajak dan dengan nama apapun, kecuali untuk pajak-pajak lokal yang dikenakan oleh pemerintah setempat.

Pasal 24

TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

- (1) Apabila seseorang atau suatu badan yang anggotanya hanya terdiri dari dua orang atau dua Negara pihak pada Persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang-undangan nasional dari masing-masing Negara, maka ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang di Negara pihak pada Persetujuan dimana ia berkedudukan, atau apabila masalah yang timbul menyangkut Pasal 23 ayat 1 kepada pejabat yang berwenang di Negara pihak pada Persetujuan dimana ia menjadi warga negara. Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.
- (2) Apabila masalah yang diajukan itu tidak berhasil untuk diselesaikan dan apabila masalah itu tidak dapat diselesaikan secara persahabatan yang memuaskan antara dua Negara pihak yang bersangkutan, maka masing-masing pejabat yang berwenang di Negara pihak yang bersangkutan akan mengajukan masalah tersebut kepada pejabat yang berwenang di Negara pihak pada Persetujuan.
- (3) Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan melalui suatu perjanjian persahabatan akan berusaha untuk menyelesaikan setiap

kesulitan atau keraguan yang timbul dalam penerapan atau penerapan Persetujuan ini. Mereka dapat juga berkonsultasi bersama untuk menegakkan penerapan pajak berganda dalam hal tidak diatur dalam Persetujuan.

- (4) Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat berhubung langsung satu sama lain untuk mencapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat sebelumnya. Apabila disatukan demi pendapat secara lisan, pelaksanaan pendapat tersebut dapat berlangsung melalui satu Komisi yang terdiri atas perwakilan-perwakilan dari pejabat yang berwenang dari Negara-negara pihak pada Persetujuan.

Pasal 25

PERTUKARAN INFORMASI

- (1) Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan melakukan atau menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan undang-undang nasional Negara-nasing-masing mengenai pajak-pajak yang disebut dalam Persetujuan, sepanjang penerapan pajak menurut undang-undang Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Persetujuan ini. Pertukaran informasi tidak dibatasi oleh ketentuan Pasal 1. Setiap informasi yang diterima oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan harus dijaga kerahasiannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan undang-undang nasional Negara tersebut dan hanya dapat diungkapkan kepada orang atau badan atau pejabat-pejabat (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau pengalihan pajak, pelaksanaan undang-undang atau peraturan, atau dalam memajukan kooperasi berkaitan dengan pajak-pajak yang disebut dalam Persetujuan ini. Orang atau badan atau para pejabat tersebut harus tidak memberikan informasi itu untuk maksud-maksud di atas. Mereka dapat juga mengungkapkan informasi itu dalam pengadilan umum atau dalam pengadilan administrasi-apungat pengadilan.
- (2) Regulasi yang juga dapat berkaitan dengan hal-hal yang disebut dalam ayat (1) tidak akan dikurangkan atau sehingga akan berlaku kepada Negara pihak pada Persetujuan yang lain.
- (3) Tidak akan ada pengalihan informasi yang berkaitan dengan undang-undang atau praktik administratif yang berlaku di Negara pihak atau Negara pihak lainnya pada Persetujuan.

- b) memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam praktik administrasi yang lazim di Negara tersebut atau di Negara pihak lainnya pada Persetujuan;
- c) memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia apapun, di bidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian, atau tata cara produksi atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijaksanaan umum (*ordre public*).

Pasal 26

PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari anggota-anggota misi diplomatik dan konsuler berdasarkan peraturan-peraturan umum hukum internasional atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu persetujuan khusus.

Pasal 27

BERLAKUNYA PERSETUJUAN

- (1) Persetujuan ini akan berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dari tanggal saat masing-masing Pemerintah saling memberitahu secara tertulis melalui saluran diplomatik bahwa formalitas sebagaimana disarankan dalam konsultasi masing-masing Negara telah diperoleh.
- (2) Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini akan berlaku:
 - a) mengenai pajak yang dipotong pada sumber penghasilan untuk pengasaher yang diperoleh sebelum atau setelah tanggal 1 Januari tahun terakhir berakutya sesudah berlakunya Persetujuan ini dan
 - b) mengenai pajak lain-lain atas penghasilan untuk individu-individu yang tinggal pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah berakhirnya Persetujuan ini.

Pasal 28

BERAKHIRNYA PERSETUJUAN

Persetujuan ini akan tetap berlaku tanpa batas waktu, tetapi kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat menyampaikan pemberitahuan untuk tidak melaksanakan Persetujuan ini secara tertulis kepada Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui saluran diplomatik pada atau sebelum tanggal 30 Juni setiap tahun takwim di mulai setelah jangka waktu lima tahun sejak tanggal berakainya Persetujuan.

Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan tidak berlaku lagi :

- a) mengenai pajak yang dipotong pada sumber penghasilan, untuk penghasilan yang diperoleh pada atau sebelum tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya setelah tahun pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan
- b) mengenai pajak-pajak lainnya atas penghasilan, untuk tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya setelah tahun pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan

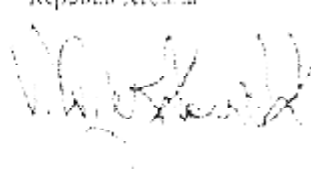
DENGAN KESAKSIAN para penandatangan di bawah ini, yang telah memperoleh kuasa yang sah telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1962, dalam bahasa Indonesia, Kroasia dan Inggris, semua naskah tersebut berkekuatan sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia



Untuk Pemerintah
Republik Kroasia



UGOVOR
IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE INDONESIA
I
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I
SPREČAVANJU IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA NA
DOHODAK

Vlada Republike Indonezijske
I
Vlada Republike Hrvatske

Želeći sklopiti Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

U ime svoje Vlade sklopi

Članak 1.

OSOBE NA KOJE SE PRIMJENJUJE UGOVOR

Ovaj ugovor primjenjuje se na osobe koje su rezidenti jedne ili obje država ugovornica.

Članak 2.

POREZI NA KOJE SE PRIMJENJUJE UGOVOR

- (1) Ugovor se primjenjuje na poreze na dohodak koje je uvela jedna od država ugovornica ili njezina tijela lokalne samouprave i uprave, neovisno o načinu na koji se ubiru.
- (2) Porezi na dohodak smatraju se svi porezi uvedeni na ukupni dohodak ili na dijelove dohodka, uključujući poreze na porast imovine i poreze na dobitke od dluženja pokretne ili nepokretne imovine.
- (3) Postojeći porezi na koje se primjenjuje ovaj Ugovor posebno su:
 - a) u slučaju Indonezije:
 - porez na dohodak prema Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (broj 7 Zakona z 1983)
 - (u daljnjem tekstu "indonezijski porez")
 - b) u slučaju Hrvatske:
 - (i) porez na dobit;
 - (ii) porez na dohodak; - (u daljnjem tekstu "hrvatski porez")
- (4) Ovaj Ugovor primjenjuje se i na iste ili bitno slične poreze koji se uvedu od dana potpisivanja ovog Ugovora iz navedene poreze ili umjesto njih, u skladu sa zakonima države ugovornice. Nadležna tijela država ugovornica priopćavat će na kraju svake godine jedne drugima bitne promjene u svojim poreznim zakonima.

Članak 3.

OPĆE DEFINICIJE

- (1) Za potrebe ovog Ugovora svi iz konteksta ne proizlaze drugačije:
 - a) izraz "Indonezijski izraz" označava područje Republike Indonezije kao što je to definirano indonezijskim propisima;
 - b) izraz "hrvatski izraz" označava područje Republike Hrvatske, u skladu s međunarodno priznatim granicama područja javne teritorijalne moći, uključujući područje izdvojenosti, na kojima Republika Hrvatska, u skladu s međunarodnim pravom, ostvaruje sva svoja suverena prava i nadležnosti;
 - c) izrazi "država ugovornica" i "druga država ugovornica" označavaju Republiku Indoneziju i Republiku Hrvatsku ovisno o kontekstu;

- d) izraz "osoba" uključuje fizičku osobu, društvo ili koju drugu pravnu osobu;
- e) izraz "društvo" označava svaku pravnu osobu ili drugi organizacijski oblik koji se u svrhe oporezivanja smatra pravnom osobom;
- f) izraz "društvo države ugovornice" i "društvo druge države ugovornice" označavaju trgovačko društvo kojim upravlja rezident države ugovornice i trgovačko društvo kojim upravlja rezident druge države ugovornice;
- g) izraz "međunarodni promet" označava svaki prijevoz brodom ili zrakoplovom koji obavija društvo jedne od država ugovornica, osim ako se promet brodom ili zrakoplovom obavija samo između mjesta u drugoj državi ugovornice;
- h) izraz "državljanin" označava sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo jedne od država ugovornica i svaku pravnu osobu, partnerstvo ili udruženje koji svoj status izvode iz propisa koji vrijede u jednoj od država ugovornica;
- i) izraz "nadležno tijelo" znači:
 - (i) u slučaju Republike Indonezije, ministra financija ili njegova ovlaštenog predstavnika;
 - (ii) u slučaju Republike Hrvatske, ministra financija ili njegova ovlaštenog predstavnika.

(2) U svrhu primjene ovog Ugovora u bilo kojem trenutku od strane države ugovornice, svaki izraz koji nije njome definirani, osim ako sadržaj ne zahtjeva drugačije, imaće značenje koje u tom trenutku ima prema propisima te države u svrhu poreznog postupka. Ova Ugovor primjenjuje, s tim da će svako značenje koje je u skladu s primijenjenim poreznim propisima te države ugovornice biti mjeraodavno u odnosu na značenje dano u skladu s propisima druge države ugovornice.

Članak 4. REZIDENT

- (1) U ovom ugovoru izraz "rezident države ugovornice" označava svaku osobu koja prema propisima države ugovornice podliježe oporezivanju na temelju svoga prebivališta, boravišta, mjesta sjedišta društva, mjesta sjedišta uprave ili nekog drugog obilježja sličnog značenja. Ova izraz ne uključuje osobu koja podliježe oporezivanju samo s obzirom na izvor u toj državi.
- (2) Ako je, prema naredbama stavka 1, fizička osoba rezident obje države ugovornice, onda se njegov status određuje sukladno sljedećim pravilima:
 - a) smatrat će se rezidentom one države u kojoj ima prebivalište, ako ima prebivalište u objema državama, smatrat će se rezidentom samo one države s kojom ima najviše osobne i gospodarske veze (prebivalište ili drugi interesi);
 - b) ako se ne može odlučiti u bilo kojoj, ima sjedište društva u jednoj od njih, smatrat će se rezidentom države u kojoj ima sjedište društva;
 - c) ako osoba ima udiočeno boravište u objema državama, ali ga nema ni u jednoj od njih, smatrat će se rezidentom samo one države ugovornice čiji je državljanin.

- d) ako je osoba državljanin obje država ili nije državljanin nijedne od njih, nadležna tijela država ugovornica odlučiti će o tome međusobnim dogovorom;
- (3) Kao je, sukladno odredbama stavka 1, pravna osoba rezident obje država ugovornica, tada će se smatrati rezidentom one država ugovornice u kojoj je osnovana.

Članak 5. STALNA POSLOVNA JEDINICA

- (1) Za svrhe ovog Ugovora izraz "stalna poslovna jedinica" označava stalno mjesto poslovanja preko kojega se poslovanje društva u cijelosti ili djelomično obavlja.
- (2) Izraz "stalna poslovna jedinica" uključuje posebno:
- a) mjesto uprave;
 - b) podružnicu;
 - c) ured;
 - d) tvornicu;
 - e) radionicu;
 - f) farmu ili plantažu;
 - g) rudnik, natfni ili plinski izvor, kâmenolom ili neko drugo mjesto na kojem se obavlja istraživanje ili iskorištavanje prirodnih bogatstava.
- (3) Izraz "stalna poslovna jedinica" uključuje također i:
- a) gradilište ili građevinski, montažni ili instalacijski projekt ili s tim povezana aktivnost nadgledanja, i to samo ako traje duže od šest mjeseci;
 - b) pružanje usluga uključujući usluge savjetovanja nekog društva države ugovornice uz pomoć namještenika ili drugog zaposlenika u drugoj državi ugovornice, pod uvjetom da se takve djelatnosti nastavljaju za isti projekt ili za neki s tim povezan projekt, a za razdoblja koja zajedno ne prelažu rok od tri mjeseca u svakom dvanaestomesečnom periodu;
 - c) korištenje instalacija ili pušilačke opreme ili broda u jednoj državi ugovornici kako bi se istražila ili iskorištala prirodna bogatstva, ali samo ako takvo korištenje traje duže od 120 dana.
- (4) Neovirno od prethodnih odredaba ovog članka, neće se smatrati da stalna poslovna jedinica uključuje:
- a) korištenje objekata isključivo za skladištenje, transport, utovar, docara, otpreme ili prebacivanje robe;
 - b) održavanje, popravak, održavanje ili remont koje obavlja društvo isključivo u svrhu usklađivanja izlaganja ili isporuke;
 - c) održavanje zaliha docara ili robe koje pripadaju društvu isključivo u svrhu prebacivanja robe obavlja drugo društvo.

- d) održavanje stalnog mjesta poslovanja isključivo u svrhu kupnje robe ili za prikupljanje podataka za društvo;
 - e) održavanje stalnog mjesta poslovanja isključivo u svrhu obavljanja drugih pripremnih ili pomoćnih djelatnosti za društvo;
 - f) održavanje stalnog mjesta poslovanja isključivo zbog kombinacije djelatnosti spomenutih u podstavcima od a) do e) pod uvjetom da je ukupna djelatnost stalnog mjesta poslovanja, koja je posljedica te kombinacije, ima pripremnu ili pomoćno značenje.
- (5) Neovisno o odredbama stavka 1. i 2., kad osoba koja nije zastupnik sa samostalnim statusom na koju se odnosi stavak 8. djeluje u ime društva te ima ovlaštenje da u državi ugovornici zaključuje ugovore u ime tog društva, smatrat će se da to društvo ima stalnu poslovnu jedinicu u toj državi ugovornici u odnosu na sve aktivnosti koje te osobe poduzme za društvo, osim ako su djelatnosti te osobe ograničene na djelatnosti navedene u stavku 4. koje, ako bi se obavljale preko stalnog mjesta poslovanja, ne bi to stalno mjesto poslovanja činile stalnom poslovnom jedinicom prema odredbama tog stavka.
- (6) Ne smatra se da društvo ima stalnu poslovnu jedinicu u državi ugovornici ukoliko svoje poslovanje u toj državi obavlja preko posrednika, generalnog komisijskog zastupnika ili drugog predstavnika sa samostalnim statusom ako te osobe rade u okviru svoje redovite poslovne djelatnosti.
- (7) Činjenica da društvo koje je rezident države ugovornice kontrolira i je u većinskom vlasništvu društva koje je rezident druge države ugovornice ili koje obavlja svoju djelatnost u toj drugoj državi (preko stalne poslovne jedinice ili na drugi način) sama po sebi ne znači da je jedno od njih stalna poslovna jedinica drugog društva.

Članak 6. DOHODAK OD NEKRETNOSTI

- (1) Donodak koji rezident jedne države ugovornice stekne od nekretnosti koja se nalaze u drugoj državi ugovornici (uključujući donodak od poljoprivrede i šumarstva) može se oporezivati u toj drugoj državi ugovornici.
- (2) Zraz "nekretnosti" ima značenje prema propisima države ugovornice u kojoj se predmetna imovina nalazi. U ta su zraz u svakom slučaju uključeni objekti nekretnosti, stoka i oprema koje se koriste u poljoprivredi i šumarstvu, sva imovina koja se primjenjuje u oreczbi godin propisa o vlasništvu nad zemljom, pravo posluživanja nekretnosti i prava na isplate u promjenjivom ili fiksiranom iznosu kao naknada za iskorištavanje ili pravo na iskorištavanje rudnih nalazišta, vodne i drugi prirodni bogatstva, čimbenici zrakoplova i brodova, transportna sredstva, podzemni prijelazi nekretnosti.
- (3) Oredbe stavaka 1. i 2. ovog člana ne primjenjuju se na donodak od nekretnosti koji se koristi u svrhu obavljanja djelatnosti u državi ugovornici koja nije država ugovornica.
- (4) Oredbe stavaka 1. i 2. primjenjuju se i na donodak od nekretnosti društva na donodak od nekretnosti koje se koristi u obavljanju samostalne djelatnosti.

Članak 7.

DOBIT OD POSLOVANJA

- (1) Dobit društva države ugovornice oporezuje se samo u toj državi, osim ako društvo posluje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj drugoj državi. Ako društvo posluje ili je poslovalo na taj način, dobit društva može se oporezivati u toj drugoj državi ugovornici, ali samo za ona, iznos dobiti koji bude ostvaren djelatnošću te stalne poslovne jedinice.
- (2) Ako drugačije nije propisano u stavku 3. ovog članka, kada društvo države ugovornice posluje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi, u svakoj se državi ugovornici smatra da stalna poslovna jedinica svojom djelatnošću ostvaruje dobit koju bi mogla ostvariti kad bi bila zasebno i nezavisno društvo koje se davi istim ili sličnim poslovanjem pod istim ili sličnim uvjetima te kad bi poslovala potpuno samostalno s društvom čija je stalna poslovna jedinica.
- (3) Pri utvrđivanju dobiti stalne poslovne jedinice priznaju se kao odbitci troškovi nastali za potrebe stalne poslovne jedinice, uključujući upravne i opće administrativne troškove, bilo da su nastali u državi u kojoj se nalazi stalna poslovna jedinica ili drugdje. Ova odredba oti će podložna ograničenjima prema domaćim zakonima država ugovornica.
- (4) Ako je u državi ugovornici uobičajeno utvrđivati dobit stalne poslovne jedinice na temelju raspodjele ukupne dobiti društva među različitim dijelovima istog, stavak 2. nikako ne sprečava tu državu ugovornicu da takvom uobičajenom raspodjelom odredi oporezivu dobiti prihvaćeni način raspodjele mora, međutim, biti takav da rezultat bude u skladu s načelima sadržanim u ovom članku.
- (5) Neće se smatrati da stalna poslovna jedinica ostvaruje dobit samo zbog toga što kupuje dobra ili robu za društvo.
- (6) Za potrebe prethodnih stavaka, dobit stalne poslovne jedinice određuje se na isti način svake godine, osim ako ne postoji opravdan i dostatan razlog da se poslovi drugdje.
- (7) Ako dobit uključuje dijelove prihoda ili primitka koji su posebno uređeni u drugim člancima ovog Ugovora, odredbe ovog članka ne ugođu na odredbe tih članaka.

Članak 8.

POSLOVSKI IZRAČNI PROJEKT

- (1) Dobit društva države ugovornice od kontejnera brodova ili prekoptova u međunarodnom prometu oporezuje se samo u državi ugovornici čija je društvo vlasnik ili zajednički vlasnik kontejnera brodova ili prekoptova različitih.
- (2) Za potrebe ovog članka, dobit od kontejnera brodova ili prekoptova u međunarodnom prometu uključuje:
 - a) dobit od najma prekoptova ili prekoptova u međunarodnom prometu;
 - b) dobit od kontejnera, uzdržavanja ili najma kontejnera uključujući troškove pripadajuću opremu za transport kontejnera robe ili dobara;

oni čemu je takav najam ili takvo korištenje, održavanje ili najam odnosno korištenje brodova ili zrakoplova u međunarodnom prometu.

- (3) Odredbe stavaka 1. primjenjuju se i na dobit od udjela u konzorciju, zajedničkom poslovanju ili u međunarodnoj agenciji.

Članak 9. POVEZANA TRGOVAČKA DRUŠTVA

- (1) Ako

- a) društvo države ugovornice sudjeluje, izravno ili neizravno, u upravi, nadzoru ili kapitalu društva druge države ugovornice,
- b) iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva države ugovornice i društva druge države ugovornice,

i ako su u oba slučaja između ta dva društva u njihovim trgovačkim i financijskim odnosima utvrđeni uvjeti različiti od onih koji bi postojali između samostalnih društava, dobit koji bi se ostvarila koja bi se ostvarila kad takvi uvjeti ne bi postojali, može se uključiti u dobit tog društva i, sukladno tome oporezivati.

- (2) Ako država ugovornica u dobit društva te države uključuje i, sukladno tome oporezuje, dobit za koju je društvo druge države ugovornice već oporezivano u toj drugoj državi, a takva dobit je ona koja bi prvo društvo ostvarilo da su uvjeti dogovoreni između ta dva društva bili jednaki onima koje bi međusobno dogovorila samostalna društva, tada će druge države na odgovarajući način prilagoditi iznos poreza koji je ista utvrdila na tu dobit. Pri toj prilagodbi trebaju se uzeti u obzir druge odredbe ovog Ugovora a, ako je potrebno, nadležna tijela država ugovornica međusobno će se savjetovati.
- (3) Država ugovornica neće mijenjati dobit društva u okolnostima naznačenim u stavku 2. nakon isteka vremenskih rokova peobrenih u njenim poreskim zakonima.

Članak 10. DIVIDENDE

- (1) Dividende koje društvo rezident države ugovornice plaća rezidentu druge države ugovornice koji je stvarni korisnik dividendi mogu se oporezivati samo u toj drugoj državi.
- (2) Međutim, takve dividende mogu se oporezivati u državi ugovornici koja je rezident društva koje plaća dividende i to prema zakonima te države, ali ako u njenim zakonima divideni rezident druge države ugovornice tada takve dividende porez ne može biti veći od 10% od bruto iznosa dividende.

Međutim, ako država ugovornica zakonima ili drugim odredbama na drugi način povećava oporezivanje,

Ovaj stavak neće utjecati na oporezivanje na dobit društva iz koje se isplaćuju dividende.

- (3) Izraz "dividenda" upotrijebljen u ovom članku označava dohodak od dionica i podlaštenih dionica ili povlaštenih prava, računskih dionica, osnivačkih dionica ili drugih prava koja nisu potraživanja duga, sudjelovanje u dobiti, kao i dohodak koji podliježe istom načinu oporezivanja kao i dohodak od dionica sukladno preznim propisima države čija je rezident društvo koje vrši raspodjelu.
- (4) Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se ako osoba koja je nositelj prava na dividendu koji je rezident države ugovornice obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici čija je rezident društvo koje preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj državi isplaćuje dividende ili u toj drugoj državi obavlja samostanu djelatnost iz stalnog sjedišta, a prava temeljem kojega se dividende isplaćuju je stvarno povezano sa stalnom poslovnom jedinicom ili stalnim sjedištem. U tom se slučaju primjenjuju odredbe članka 7. i 8. odredbe članka 14.
- (5) Ako društvo koje je rezident države ugovornice ostvaruje dobit ili dohodak iz druge države ugovornice ta druga država ne može utvrditi nikakav porez na dividende plaćene rezidentu te druge države ili ako je posjed dionica zbog kojih se dividende plaćaju stvarno povezan sa stalnom poslovnom jedinicom ili sa stalnim sjedištem u toj drugoj državi, niti može oporezivati neraspodijelenu dobit društava, pa čak niti onda ako se plaćena dividende ili neraspodijeljena dobit u cjelosti ili djelomično sastoji od dobiti ili dohotka nastalog u toj drugoj državi.
- (6) Neovisno od bilo koje druge odredbe ovog Ugovora, kada društvo koje je rezident države ugovornice ima stalnu poslovnu jedinicu u državi ugovornici, dobit te stalne poslovne jedinice može biti podvrgnuta dodatnom porezu u toj drugoj državi u skladu s njezinim propisima, ali taj dodatni porez ne smije prelaziti 10% iznosa dobiti, nakon što se od dobiti odbije porez na dobit i drugi porezi na dobit u toj drugoj državi.
- (7) Odredbe stavka 8. ovog članka neće utjecati na odredbe sadržane u bilo kojem proizvodnom ugovoru ili ugovoru o radu (ili u drugim sličnim ugovorima) koji se odnose na naftni i plinski sektor ili neki drugi rudarski sektor, a koji su zaključeni od strane Vlade Indonezije, njezinog instrumentalnog, relevantnog državnog naftnog ili plinskog društva ili bilo koje druge pravne osobe koja je rezident druge države ugovornice.

Članak 11. KOMITE

- (1) Kamato nastaje u državi ugovornice i plaćena rezonom druge države ugovornice, koji je stvarni korisnik kamata, mogu se opodavati samo u toj drugoj državi ugovornici.
- (2) Međutim, kamato koji se opodavah u državi ugovornice i koji je nastao iz rata predstavlja izdavanje po likvidnoj stvarnoj korisnik kamata, a u ovom slučaju države ugovornice, shvatio bi se da se smije odvesti od iste države predstavlja kamato. Međutim, to je države ugovornice najodgovorniji odgovor na prethodna pitanja o opodavaj.
- (3) Na osnovu odredbe stavka 2, kamato koje nastanu u jednoj državi ugovornice i koje stekne Vlada druge države ugovornice, mezinacionalno tijelo centralne banke ili bilo koje

financijska institucija kontrolirana od strane vlade, kapital koji je u eksploataciji u vlasništvu vlade druge države ugovornice, kao što to može biti dogovoreno između nadležnih tijela država ugovornica, bit će izuzeto od oporezivanja u pravednomutoj državi.

- (4) Izraz "kamato" za potrebe ovog članka označava prihod od potraživanja s svake vrste, bez obzira jesu li ta potraživanja osigurana založom ili ne, i bez obzira da li nose li ne- pravo udjela u dobitku dužnika, a posebno prihod od vladinih vrijednosnica ili prihod od sveznica ili zadužnica, uključujući premija i nagrade u vezi s tim vrijednosnicama, obveznicama ili zadužnicama. Zatezne kamate zbog kašnjenja pri isplati ne smatraju se kamatama u smislu ovog članka.
- (5) Odredba stavka 1. i 2. ne primjenjuju se ako nositelj prava na kamatu koji je rezident države ugovornice posluje u drugoj državi ugovornici u kojoj su te kamate nastale putem stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi, ili u toj drugoj državi čuvlja samostalno sjedište u stalnoj jedinici u toj drugoj državi, a potraživanja na koje se kamate plaćaju je stvarno povezano s takvom stalnom poslovnom jedinicom ili stalnim sjedištem. U tom se slučaju primjenjuju odredbe članka 7. ili članka 14. ovisno o slučaju.
- (6) Smatra se da kamate nastaju u državi ugovornici kad je isplatiatelj rezident te države ugovornice. Međutim, ako isplatiatelj kamata bez obzira da li je rezident države ugovornice ili ne, u državi ugovornici ima stalnu poslovnu jedinicu u stalno sjedište u vezi s kojima je dugovanje na koje se kamate plaćaju nastalo, a takve kamate smatra se da nastaju u toj državi ugovornici, tj. u državi u kojoj se nalazi stalna poslovna jedinica ili stalno sjedište.
- (7) Ako je zbog posebnog odnosa između isplatiatelja i nositelja prava na kamatu ili između njih i neke druge osobe, iznos kamata, uzimajući u obzir potraživanja na koje se kamate plaćaju, veći od iznosa koji bi bio ugovoren između isplatiatelja i nositelja prava na kamatu da nema takvog odnosa, odredbe ovog članka primjenjuju se samo na zadnje spomenuti iznos. U takvom se slučaju višak plaćenog iznosa oporezuje sukladno propisima svake države ugovornice, uzimajući u obzir druge odredbe ovog Ugovora.

Članak 12. AUTORSKE NAKNADE

- [illegible]

- (4) Odredbe stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se ako nositelj prava na autorsku naknadu koji je rezident države ugovornice posluje u drugoj državi ugovornici u kojoj je ostvareno pravo na autorsku naknadu putem stalne poslovne jedinice u toj državi ugovornici, ili obavlja u toj državi ugovornici samostalnu djelatnost iz stalnog sjedišta koje se u toj državi ugovornici nalazi, a prava ili imovina temeljeni koje se autorske naknade isplaćuju stvarno su povezane s takvom stalnom poslovnom jedinicom ili stalnim sjedištem. U tom se slučaju primjenjuju odredbe članka 7. odnosno članka 14.
- (5) Smatra se da autorske naknade nastaju u državi ugovornici kad je isplatiatelj rezident te države ugovornice. Međutim, ako osoba koja isplaćuje autorske naknade bez obzira je li ona rezident države ugovornice ili ne, u državi ugovornici ima stalnu poslovnu jedinicu ili stalno sjedište u svezi s kojim je nastala obveza isplate autorske naknade, a takve naknade snosi ta stalna poslovna jedinica ili stalno sjedište, tada se smatra da takve naknade nastaju u državi ugovornici u kojoj se nalazi stalna poslovna jedinica ili stalno sjedište.
- (6) Ako je zbog posebnog odnosa između isplatiatelja i nositelja prava na autorsku naknadu ili između njih i neke druge osobe, iznos autorskih naknada, uzimajući u obzir korištenje, pravo ili podatke za koje se takve naknade plaćaju, veći od iznosa koji bi bio ugovoren između isplatiatelja i nositelja prava na autorsku naknadu da nema takva odnosa, odredbe ovog članka primjenjuju se samo na potonji iznos. U takvom se slučaju višak plaćenog iznosa oporeziv sukladno propisima svake države ugovornice, uzimajući u obzir druge odredbe ovog ugovora.

Članak 13. DOBIT OD OTUĐENJA IMOVINE

- (1) Dobit koju rezident države ugovornice ostvari od otuđenja nekretnosti navedenih u članku 8, a koje se nalaze u drugoj državi ugovornici, može se oporezivati u toj drugoj državi ugovornici.
- (2) Dobit od otuđenja pokretne imovine koja je dio poslovne imovine stalne poslovne jedinice koju društvo države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici, ili pokretne imovine koja pripada stalnom sjedištu rezidenta države ugovornice u drugoj državi ugovornici u svrhu obavljanja samostalne djelatnosti, uključujući dobit od otuđenja takve stalne poslovne jedinice (zajedno s dijelom društva) ili takvog stalnog sjedišta, može se oporezivati u toj drugoj državi.
- (3) Dobit koju društvo države ugovornice ostvari od otuđenja predmeta iz stavaka 1. i 2. ne koristi u međunarodnom prometu, a pokretne imovine iz stavaka 1. i 2. oporezuje se samo u toj državi ugovornici.
- (4) Dobit od otuđenja imovine nekog običnog člana društva (osobna dobit), uključujući imovinu koja se nalazi u toj državi ugovornici, oporezuje se u toj državi.
- (5) Dobit od otuđenja imovine na koju se odnose stavci 1. do 4. oporezuje se samo u državi ugovornici u kojoj je otuđitelj rezident.

Članak 14.
SAMOSTALNA DJELATNOST

- (1) Dohodak koji ostvari rezident države ugovornice od profesionalne djelatnosti i drugih samostalnih djelatnosti oporezuje se samo u toj državi osim u jednom od sljedećih slučajeva kad se takav dohodak može oporezivati u drugoj državi ugovornici:
 - a) ako u drugoj državi ugovornici ima stalno sjedište koje mu redovito stoji na raspolaganje za obavljanje njegovih djelatnosti, oporezuje se samo ona, čio dohotka koji se može pripisati tom stalnom sjedištu u toj drugoj državi;
 - b) ako njegov boravak u toj drugoj državi ugovornici traje duže od razdoblja koje ukupno prelazi 90 dana u svakom dvanaestomjesečnom periodu, može se oporezivati samo onaj dio dohotka koji se ostvari od njegovih djelatnosti obavljenih u toj drugoj državi;
- (2) Izraz "profesionalne djelatnosti" uključuje posebno samostalne znanstvene, književne, umjetničke, obrazovne ili nastavne djelatnosti te samostalne djelatnosti lijebnika, pravnika, inženjera, arhitekata, zubara i knjigovođa.

Članak 15.
NESAMOSTALNI RAD

- (1) Ako nije drugačije propisano odredbama članika 16, 18. i 19., plaće i slična primanja koje rezident države ugovornice ostvari nesamostalnim radom oporezuju se samo u toj državi, osim ako je riječ o nesamostalnom radu koji se obavlja u drugoj državi ugovornici. Ako se radi o takvom nesamostalnom radu, primanja koja se od toga ostvaruju, mogu se oporezivati u toj drugoj državi ugovornici.
- (2) Neovisno o odredbama stavka 1., primanja od nesamostalnog rada koja rezident države ugovornice ostvaruje od nesamostalnog rada u drugoj državi ugovornici oporezivati se se samo u prvospomenutoj državi ako su svi sljedeći uvjeti ispunjeni:
 - a) ako rezident boravi u drugoj državi u razdoblju ili razdobljima koje u ovom zbroju ne traje ukupno duže od 183 dana u toj kalendarskoj godini;
 - b) ako primanja isplaćuje poslodavac koji nije rezident druge države ugovornice i se ona isplaćuju u njegovo ime;
 - c) ako primanje ne tereti stalnu poslovnu jedinicu ili stalno sjedište koje poslodavac ima u toj drugoj državi.
- (3) Neovisno o prethodnim odredbama ovog članka, primanja od primanja od nesamostalnog rada ne teretiti u drugoj državi koji se koristi u međunarodnom prometu, a neeksteri druge države ugovornice oporezivati će se samo u toj državi.

Članak 16.

NAKNADE ČLANOVA UPRAVE

Naknade članova uprave i druga slična plaćanja koja osvan rezident države ugovornice za rad u svojstvu člana uprave ili drugog sličnog tijela društva koje je rezident druge države mogu se oporezivati u toj drugoj državi ugovornici.

Članak 17.

UMJETNICI I ŠPORTAŠI

- (1) Neovisno o odredbama članaka 14. i 15., dohodak koji od svoje samostalne djelatnosti u drugoj državi ugovornici ostvari rezident države ugovornice kao izvođač, primjerice kao kazališni, filmski, radijski ili televizijski umjetnik ili glazbenik te kao športaš, može se oporezivati u toj drugoj državi ugovornici.
- (2) Ako dohodak od samostalne djelatnosti u svojstvu izvođača ili športaša ne pripada izvođaču ili športašu, već nekoj drugoj osobi, taj se dohodak neovisno o odredbama članaka 7., 14. i 15. može oporezivati u državi ugovornici u kojoj izvođač ili športaš obavlja svoju djelatnost.

Članak 18.

MIROVINE

Ako drugačije nije propisano odredbama članka 19. stavka 2., mirovine i druga slična primanja isplaćena rezidentu države ugovornice s obzirom na njegov prijašnji nesamostalni rad oporezuju se samo u toj državi.

Članak 19.

DRŽAVNA SLUŽBA

- (1) a) Plaće, honorari i druga slična primanja (osim mirovine) koje država ugovornica ili tijelo njezine lokalne samouprave i uprave isplati fizičkoj osobi za rad u državnoj službi za tu državu ugovornicu ili za rad u njenim tijelima lokalne samouprave i uprave oporezuju se samo u toj državi ugovornici.
- b) Takve se plaće, honorari i druga slična primanja, međutim, oporezuju samo u drugoj državi ugovornici ako se ta služba obavljala u toj državi i ako je fizička osoba rezident te države, te ako u potpunosti zadovoljava jedan od sljedećih uvjeta:
 - (i) da je državljanin te države;
 - (ii) da nije postao rezident te države samo radi obavljanja te službe;
 - (iii) da je imao stalno prebivalište u toj državi ugovornici prije početka obavljanja te službe.
- (2) a) Te mirovine, međutim, oporezuju se samo u drugoj državi ugovornici ako je fizička osoba rezident i državljanin te druge države ugovornice.

- (3) Oredbe članaka 15., 16. i 18. primjenjuju se na plaće, honorare i druge slične primike i mirovine koje se odnose na službu u svezi s djelatnošću države ugovornice ili njenog tjela lokalne samouprave ili uprave.

Članak 20.

PROFESORI, NASTAVNICI, STUDENTI I VJEŽBENICI

- (1) Plaćanja koja prima profesor ili nastavnik koji jest ili je neposredno prije posjeta državi ugovornici bio rezident druge države ugovornice, a koji u toj državi ugovornici ne boravi više od dvije godine radi znanstvenih studija ili istraživanja ili radi nastavne djelatnosti na sveučilištu, visokoj školi ili drugoj obrazovnoj ustanovi neće se oporezivati u prvoj državi ugovornici, uz uvjet da ti primici proizlaze od izvora izvan te države ugovornice.
- (2) Fizička osoba koja jest ili je neposredno prije posjeta državi ugovornici bila rezident druge države ugovornice, a koja privremeno boravi u prvoj državi ugovornici isključivo kao student sveučilišta, visoke škole ili druge slične obrazovne ustanove ili kao vježbenik biti će od datuma prvog dolaska u tu državu ugovornicu u svezi s školovanjem izuzeta od plaćanja poreza u toj državi ugovornici:
- a) na sve primike ostvarene radi njenog uzdržavanja, obrazovanja ili obuke, uz uvjet da takva plaćanja proizlaze iz izvora izvan te države ugovornice;
 - b) za razdoblje koje ne prelazi 2 godine, na sva primanja koja ne prelaze 1200 američkih dolara po kalendarskoj godini za nesamostalni rad koji obavlja u toj državi s ciljem nadopunjavanja sredstava koja su mu na raspolaganju za te svrhe.
- (3) Fizička osoba koja jest ili je neposredno prije posjeta državi ugovornici bila rezident druge države ugovornice i koja privremeno boravi u prvoj državi ugovornici isključivo radi studija, istraživanja ili obuke kao primatelj stipendije, subvencije ili nagrade koju daje znanstvena, obrazovna, vjerska ili humanitarna organizacija, ili je ostvarena u sklopu programa tehničke pomoći u koju je uključena Vlada države ugovornice, biti će oslobođena od plaćanja poreza u toj državi ugovornici na:
- a) iznos takve stipendije, potpore ili nagrade;
 - b) sve plaćanja primljena u svrhu svog uzdržavanja, obrazovanja ili obuke uz uvjet da takva plaćanja proizlaze iz izvora izvan te države ugovornice.

Članak 21.

OSTALI DOHODAK

- (1) Dječji primici rezidenta države ugovornice bez obzira gdje su nastali, a koji su nastupili u prethodnom članku ovog Ugovora, neće biti oporezovani u prvoj državi ugovornici, osim ako se sami nastoje u toj državi.

- (2) Odredbe stavka 1. ne primjenjuju se na dohodak, osim na dohodak od nekretnosti definiranog u članku 6. stavke 2., ako primaatelj takvog dohodka, a koji je rezident države ugovornice, posluje u drugoj državi ugovornici putem stalne poslovne jedinice ili u toj drugoj državi obavlja samostalnu djelatnost iz stalnog sjedišta koje se u njoj nalazi, a pravo ili imovina na temelju kojih se dohodak isplaćuje stvarno su povezani s takvom stalnom poslovnom jedinicom ili stalnim sjedištem. U takvom slučaju primjenjivat će se odredbe članka 7. i članka 14.

Članak 22.

IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

- (1) Kada rezident Hrvatske ostvari dohodak koje se u skladu s odredbama ovog Ugovora može oporezivati u Indoneziji, Hrvatska će odbiti kao odbitak od poreza na dohodak tog rezidenta iznos koji je jednak porezu na dohodak plaćenom u Indoneziji. Takav odbitak ne smije biti veći od onog dijela poreza na dohodak koji je utvrđen prije odbitka, a koji se može pripisati dohotku koji je oporezivan u Indoneziji.
- (2) Kada rezident Indonezije ostvari dohodak iz Hrvatske, iznos poreza na taj dohodak plaćen u Hrvatskoj bit će dopušten u skladu s ovim ugovorom kao kredit naspram porezu tog rezidenta, a koji je razrijezan u Indoneziji. Iznos kredita ne smije prijeći iznos poreza u Indoneziji na taj dohodak, a koji je obračunat u skladu s indonezijskim poreznim propisima i pravilima.
- (3) Neovisno o odredbama indonezijskih propisa, Indonezija će odbiti kredit naznačen u stavku 2. u odnosu na poreze koji se mogu plaćati u Hrvatskoj na dividendu sukladno odredbama članka 10. stavka 2. i kamata sukladno odredbama članka 11. stavka 2. ovog Ugovora, ali koji je privremeno izuzet ili reduciran sukladno hrvatskim poreznim propisima.

Članak 23.

JEDNAKO POSTUPANJE

- (1) Državljeni države ugovornice u drugoj državi ugovornici ne smiju biti podvrgnuti nikakvom oporezivanju ili obvezi ispunjavanja s njime povezanim uvjetima, ako se to razlikuje ili predstavlja veći teret od oporezivanja i s njime povezanim uvjetima kojima podliježu ili mogu podlijeći državljani te druge države u istim okolnostima.
- (2) Stalna poslovna jedinica koju pruživa države ugovornice u drugoj državi ugovornici ne smije biti u toj drugoj državi oporezivana pod manje povoljnim uvjetima od onih koji vječe za pruživa te druge države koje obavljaju iste djelatnosti. One se odredbe ne smiju tumačiti tako da odnose državu ugovornicu od odgovornosti druge države ugovornice zbog plaćenskog kredita u poreznim obvezama, podrijetla iz iste države ili kredita, smetanja ili poreznog otpisa prema bilo kojim zakonima.

- (3) Društva države ugovornice čija je imovina u cijelosti ili djelomično u vlasništvu i pod izravnom ili neizravnom kontrolom jednog ili više rezidenata druge države ugovornice, u prispomenutoj državi ne podliježu nikakvom oporezivanju i s tim povezanim obvezama koje su drugačije ili predstavljaju već teret od oporezivanja i s tim povezanim obvezama kojima podliježu ili mogu podlijegati slična društva prispomenute države.
- (4) Osim kada se primjenjuju odredbe članka 9. stavka 1., članka 11. stavka 6. ili članka 12. stavka 4., kamato, autorske naknade i druge isplate koje društvo države ugovornice plaća rezidentu druge države ugovornice, u prispomenutoj državi ne podliježu nikakvom oporezivanju i s tim povezanim obvezama koje su drugačije ili predstavljaju već teret od oporezivanja i s tim povezanim obvezama kojima podliježu ili mogu podlijegati slična društva prispomenute države.
- (5) Odredbe ovog članka vrijede, neovisno o članku 2., za poreze čije su vrste i naziva, a koji su predmet ovog Ugovora osim poreza koja usinu nadležna tijela lokalne samouprave i uprave.

Članak 24.

POSTUPAK ZAJEDNIČKOG DOGOVARANJA

- (1) Ako osoba smatra da postupci jedne ili obje država ugovornice imaju ili će imati za njege kao posljedicu oporezivanja koje nije u skladu s odredbama ovog Ugovora, ona može, neovisno o pravnom tijeku predviđenih u domaćim propisima tih država, iznijeti svoj slučaj pred nadležno tijelo države ugovornice čiji je rezident ili, ako je njezin slučaj obuhvaćen člankom 23. stavka 1., tijelo države ugovornice čiji je državljanin. Postupak se mora prijaviti u roku od tri godine od saznanja za postupak koji je doveo do oporezivanja protivno odredbama ovog Ugovora.
- (2) Ako nadležno tijelo smatra da je prigovor opravdan, a ne može ga samostalno riješiti ne zadovoljavajući način, ona će radi izbjegavanja oporezivanja koje bi bilo u neskladu s ovim Ugovorom nastojati doći do rješenja u dogovoru s nadležnim tijelom druge države ugovornice. Postignuti dogovor provest će se bez obzira na točke predviđene unutarnjim propisima država ugovornica.
- (3) Nadležna tijela država ugovornica nastojat će riješiti sve teškoće i nejasnoće koje se pojave pri tumačenju ili primjeni ovog Ugovora zajedničkim dogovorom. Ta se tijela mogu dogovarati i o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u slučajevima koji nisu predviđeni ovim Ugovorom.
- (4) Nadležna tijela država ugovornica mogu međusobno držano opati u svim postignutim dogovorima u smislu prethodne stavke. Ako je radi postizanja dogovora potrebna izmjena, zamjena, mijenjanje ili neka druga promjena komisijske naravi, ona će zasjedati nadležna tijela država ugovornica.

Članak 25.

RAZMJENA OBAVJESTI

- (1) Nadležna tijela država ugovornica razmjenjuju obavijesti potrebne za provedbu odredaba ovog Ugovora ili unutarnjih propisa država ugovornica koje se odnose na poreze obuhvaćene ovim Ugovorom. Svaku obavijest koju primi država ugovornica smatrat će se tajnom na isti način kao i obavijesti dobivene prema unutarnjim propisima te države, te se mogu priopćiti samo osobama ili tijelima (uključujući sudove i upravna tijela) uključenim u postupak izvrše, kaznenog progona ili odlučivanja po pravnim lijekovima koji se odnose na te poreze. Spomenute osobe ili tijela koriste će se tim informacijama samo u navedene svrhe. Takve podatke mogu otkrivati u javnom sudskom postupku ili sudskoj odluci.
- (2) Odredba stavka 1. ne mogu se ni u kojem slučaju tumačiti tako da državi ugovornice nameću obvezu da:
- a) poduzima upravne mjere suprotne propisima ili praksi te ili druge države ugovornice;
 - b) daje obavijesti koji su u skladu s propisima ili uobičajenom upravnom postupku te ili druge države ugovornice službena tajna;
 - c) daje obavijest čije bi otkrivanje povrijedilo obvezu čuvanja trgovačke poslovne, industrijske, komercijalne ili profesionalne tajne ili trgovačkih postupaka, te daje podatke čije bi otkrivanje bilo suprotno javnom poretku.

Članak 26.

DIPLOMATSKO I KONZULARNO OSOBLJE

Odredbe ovog Ugovora ne utječu na posebne povlastice diplomatskih i konzularnih predstavnika predviđene općim pravilima međunarodnog prava ili odredbama posebnih ugovora.

Članak 27.

STUPANJE NA SNAGU

- (1) Ugovor stupa na snagu datumom završetka obavijesti done diplomatskim putem između Vlade država ugovornica o tome da su formalnosti za usvajanje ovog Ugovora završene.
- (2) Odredbe ovog primjenjuju se u državama ugovornicama:
- a) u odnosu na poreze koji su zadržani na izvornu, na danse ovdje i u potpisu u skladu s prilogom sjeđnja one kalendarske godine koja neposredno slijedi godinu u kojoj je ovaj Ugovor potpisan;
 - b) u odnosu na druge poreze, na porezne razdoblja koji slijede na 1. siječnja godine koja neposredno slijedi godinu u kojoj je ovaj Ugovor potpisan.

Članak 28.
PRESTANAK

Ovaj Ugovor ostaje na snazi neograničeno vrijeme, ali svaka država ugovornica može 30. lipnja ili prije 30. lipnja svake kalendarske godine, a nakon izjeka razdoblje od pet godina od dana stupanja na snagu ovog Ugovora, diplomatskim putem drugoj državi ugovornici dostaviti pismenu obavijest o raskidu ovog Ugovora.

U tom slučaju Ugovor će prestati važiti u obje države ugovornice.

- a) u odnosu na porez zadržan na izvoru, na iznose plaćene ili dospjele na spatu na ili nakon prvog siječnja one kalendarske godine koja neposredno slijedi godinu u kojoj je dostavljena obavijest o prestanku;
- b) u odnosu na ostale poreze, za porezna razdoblja koja počinju na ili nakon prvog siječnja one kalendarske godine koja neposredno slijedi nakon godine u kojoj je dostavljena obavijest o prestanku.

U znak prihvatanja preuzetih obveza, opunomoćeni zastupnici obje države ugovornice potpisuju ovaj Ugovor.

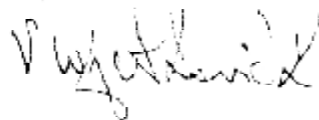
Zaključeno u _____ dana _____ 2002. godine, u dva izvornika na indonezijskom, hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

U slučaju različitog tumačenja indonezijskog i hrvatskog teksta, mjerodavan je engleski tekst.

Za Vladu
Republike Indonezije



Za Vladu
Republike Hrvatske



AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of Indonesia
and
The Government of the Republic of Croatia

DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2
TAXES COVERED

- (1) This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
- (2) There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.
- (3) The existing taxes to which this Agreement shall apply are:
 - a. In the case of Indonesia:
 - the income tax imposed under the Undang-undang Pajak Penghasilan 1982 (Law Number 7 of 1982 as amended);

hereinafter referred to as "Indonesian tax");

b) in the Republic of Croatia:

(i) the profit tax;

(ii) the income tax;

(hereinafter referred to as "Croatian tax")

(4) The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

(1) For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- a) the term "Indonesia" means the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws;
- b) the term "Croatia" means the territory of the Republic of Croatia as well as those maritime areas adjacent to the outer limit of territorial sea, including spaced and subsea thereof, over which the Republic of Croatia in accordance with international law (and the laws of the Republic of Croatia) exercises its sovereign rights and jurisdiction;
- c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean, in the context of this Agreement, Indonesia or Croatia;
- d) the term "person" includes an individual, a company and any other kind of person;
- e) the term "enterprise" includes any business, trade, profession, or any other activity carried on by an individual or by a body corporate for tax purposes;
- f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a person of a Contracting State or the other Contracting State.

Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

h) the term "national" means any individual possessing the citizenship of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

i) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Indonesia, the Minister of Finance or his authorized representative;

(ii) in the case of Croatia, the Minister of Finance or his authorized representative;

(2) As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of the State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4 RESIDENT

(1) For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable in that State to taxes solely of income from sources in that State.

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident of both Contracting States, then this article shall be interpreted as follows:

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (center of vital interests);

- b) If the State in which he has his center of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode.
 - c) If he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
 - d) If he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
- (3) Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5 PERMANENT ESTABLISHMENT

- (1) For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
- (2) The term "permanent establishment" includes especially:
- a) a place of management,
 - b) a branch,
 - c) an office,
 - d) a factory,
 - e) a workshop,
 - f) a farm or plantation, and
 - g) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction or exploitation of natural resources.
- (3) The term "permanent establishment" likewise encompasses:
- a) a building site or construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, only where they are more than incidental;
 - b) the conducting of construction, assembly or installation projects in the other Contracting State through employees or other engaged persons in the same Contracting State, provided that such activities continue for the same project or a connected project for a period or periods aggregating more than 18 months within any twelve month period.

c) the use of an installation or drilling rig or ship in a Contracting State to explore for or exploit natural resources constitutes a permanent establishment only if such use is for more than 120 days.

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display;
- c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and 2, where a person (other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies) is a long or exclusive agent of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of that person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised, would not create a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

(6) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

- (7) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

- (1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- (2) The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
- (3) The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
- (4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

- (1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise has a permanent establishment in the other Contracting State. In that case, the profits of the enterprise may be taxed in the other State also, but only to the extent that the profits of the enterprise may be attributed to that permanent establishment.
- (2) Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent

establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make, if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. This provision shall apply subject to limitations under domestic law.

(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(6) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8 SHIPPING AND AIR TRANSPORT

(1) The profits from the operation of ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the enterprise has a permanent establishment.

(2) For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft include:

- a) profits derived from the incidental charter or rental of ships and aircraft in international traffic, on a bareboat basis;
 - a) profits derived from the use, maintenance or rental of containers (including related equipment for the transport of containers), used for the transport of goods or merchandise; provided that such rental, use or maintenance is incidental or supplementary to the operation of ships and aircraft in international traffic.
- (3) The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9 ASSOCIATED ENTERPRISES

(1) Where:

- a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of the other enterprise and taxed accordingly.

- (2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State, and taxes accordingly, a profit in which an enterprise of the other Contracting State has also entered or in which that enterprise and another enterprise of the first Contracting State have entered, and the profits of the first enterprise have been taxed in that State, and conditions are made or imposed between the two enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits, in order to give such adjustment. The extent shall be had to the other provisions of this Agreement.

and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.

- (2) A Contracting State shall not change the profits of an enterprise in the circumstances referred to in paragraph 1 after the expiry of the time limit provided in its tax laws.

Article 10 DIVIDENDS

- (1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- (2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10% of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

- (3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
- (4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, or exercises in that other State a profession or independent activity, in which case the provisions of Articles 7, 8 and 14 shall apply alternatively.
- (5) Where a resident of a Contracting State is the beneficial owner of dividends paid by a company of the other Contracting State, that other State may not, in respect of such dividends paid by the company, exercise a more favourable tax treatment than is accorded to dividends paid to a resident of that other State or profits as the holding in respect of which the

dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

- (6) Notwithstanding any other provisions of this Agreement where a company which is a resident of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State, the profits of the permanent establishment may be subjected to an additional tax in that other State in accordance with its law, but the additional tax so charged shall not exceed 10 per cent of the amount of such profits after deducting therefrom income tax and other taxes on income imposed therein in that other State.
- (7) The provision of paragraph 6 of this Article shall not affect the provision contained in any production sharing contract and contracts of work (or any other similar contracts) relating to oil and gas sector or other mining sector concluded by the Government of Indonesia, its instrumentality, its relevant state oil and gas company or any other entity thereof with a person who is a resident of the other Contracting States.

Article 11 INTEREST

- (1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- (2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this provision.
- (3) Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in the Contracting States and derived by the Government of the other Contracting State, including all entities or departments thereof, shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

- (4) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
- (5) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
- (6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- (7) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being to the other provisions of this Agreement.

Article 12 ROYALTIES

- (1) Royalties payable by a resident of one Contracting State to a resident of the other Contracting State shall be taxable in that other State.
- (2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner

of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10% of the gross amount of the royalties.

(3) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind, now or as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, films or tapes or other means for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience (know-how).

(4) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a local authority thereof or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or the fixed base is situated.

(6) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the unexcessed amount. In such case, the excess part of the royalties shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, subject to any arrangements entered into or approved by the competent authorities of the Contracting States.

Article 13 CAPITAL GAINS

- (1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- (2) Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
- (3) Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.
- (4) Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that Contracting State.
- (5) Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1 to 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

- (1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in one of the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:
 - a. The individual has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State in connection with the activities in that other State; or
 - b. His stay in the other Contracting State is for a period or periods exceeding in the aggregate 90 days within any 12-month period; in that case only so much of

the income may be taxed in that other State as is derived from his activities performed in that other State.

- (2) The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15 DEPENDENT PERSONAL SERVICES

- (1) Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
- (2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
- the recipient is present in that other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any twelve month period, and
 - the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
 - the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
- (3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16 DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17
ARTISTES AND SPORTSMEN

- (1) Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artist, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities or such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
- (2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

Article 18
PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 10, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19
GOVERNMENT SERVICE

- (1) a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or a local authority shall be taxable only in that State.
- b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State when:
- i) he is employed by that State;
 - ii) he is employed by a local authority of that State;
 - iii) he is employed by a body or authority of that State or of a local authority thereof;
 - iv) he is employed by a body or authority of that State or of a local authority thereof which is controlled by that State or by that local authority;
 - v) he is employed by a body or authority of that State or of a local authority thereof which is established in that State for the purpose of performing the services;

(2) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or local authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

(3) The provisions of Articles 5, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

Article 20

PROFESSORS, TEACHERS, STUDENTS AND TRAINEES

(1) Remuneration which a professor or teacher who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State for a period not exceeding two years for the purpose of carrying out advanced study or research or for teaching at a university, college, school or other similar educational institution receives for such an activity shall not be taxed in the first-mentioned State, provided that such remunerations arise from sources outside that State.

(2) An individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely as a student at a university, college, school or other similar educational institution or as a trainee shall, from the date of his first arrival in that State in connection with that visit, be exempt from tax in that State:

(a) on all payments received for the purpose of his maintenance, education or training, provided that such payments arise from sources outside that State; and

(b) for a period not exceeding 2 years, on any remuneration not exceeding LSS 1200 per calendar year for dependent personal services rendered in that State with a view to utilising the resources available to him for such work.

(3) An individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of carrying out advanced study or research or for teaching at a university, college, school or other similar educational institution or as a trainee shall, from the date of his first arrival in that State in connection with that visit, be exempt from tax in that State:

the date of his first arrival in the first-mentioned State in connection with that visit, be exempt from tax in that State on:

- a) the amount of such a grant, allowance, or award; and
- b) all payments received for the purpose of his maintenance, education or training, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21 OTHER INCOME

- (1) Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with on the foregoing Articles of this Agreement, other than income in the form of lotteries, prizes shall be taxable in that State.
- (2) The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 22 ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

- (1) Where a resident of Indonesia derives income from Croatia, the amount of tax on that income payable in Croatia, in accordance with the provisions of this Agreement, shall be allowed as a credit against the tax levied in Indonesia imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed the amount of the tax so levied on that income computed in accordance with its taxation laws and regulations.
- (2) Where a resident of Croatia derives income which, but for the provisions of this Agreement, would be taxable in Indonesia, the amount of that income shall be reduced by the amount of the income tax so levied in Croatia, and the resulting amount shall be taxable in Indonesia. Such deduction shall not, however, exceed the part of the income tax so computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Indonesia.

- (7) Notwithstanding the provisions of its law, Indonesia shall give a low the credit provided for in the paragraph 2, in respect of tax which may be charged in Croatia on dividends, in accordance with provisions of paragraph 2 of Article 14 and interest, in accordance with provisions of paragraph 2 of Article 11, by virtue of this Agreement, out which is temporarily exempted or reduced under Croatian tax laws.

Article 23 NON-DISCRIMINATION

- (1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.
- (2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorable levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant, to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
- (3) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
- (4) Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 3 of Article 11, or paragraph 6 of Article 13, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible only when they bear a business relation to the activities of that State.
- (5) The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description, except for taxes imposed by municipalities.

Article 24

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

- (1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation which is in accordance with the provisions of the Agreement.
- (2) The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement.
- (3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
- (4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 25

EXCHANGE OF INFORMATION

- (7) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement and the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, and for the administration or enforcement of the Agreement. The exchange of information is approved by each State Party without prejudice to existing laws that otherwise restrict disclosure of tax information. Information obtained under this Article may not be used other than for the purposes of persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such

persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

(2) In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

Article 26

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 27

ENTRY INTO FORCE

(1) This Agreement shall enter into force on the later of the dates on which the respective Governments may notify each other in writing through diplomatic channels that the formalities constitutionally required in their respective States have been complied with.

(2) This Agreement shall have effect:

- a) in respect of any territory in the source of income derived or to be derived by the taxpayer in which the Agreement enters into force;
- b) in respect of persons, in respect of whose permanent abode in the source of income is two years following that in which the Agreement enters into force.

Article 28
TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the 30th day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give written notice of termination to the other Contracting State through diplomatic channels.

In such case, the Agreement shall cease to have effect:

- a) in respect of tax withheld at source on income derived on or after 1 January in the year next following that in which the notice of termination is given;
- b) in respect of other taxes on income, for taxable years beginning on or after 1 January in the year next following that in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized hereto, have signed this Agreement.

Done at Jakarta on the 15th day of February 2002, in duplicate in the Indonesian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic.

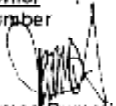
In case of any divergence of interpretations of the Indonesian and Croatian texts, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of Indonesia

For the Government of the
Republic of Croatia

Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 063 /TR/EK/2009/60
Number


Damos Dumoli Agusman
(NIP19630804 198303 1 001)
Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
Director for Economic, Socio-Cultural Treaties
Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : 12 Agustus 2009
Date